

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN

STUNTING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Departemen Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah

Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP)



OLEH:

ILHAM WILYA PUTRA

19042135

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat
Nama : Ilham Wilya Putra
NIM/TM : 19042135/2019.
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara.
Departemen : Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial.

Padang, 16 Februari 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap., MPM.
NIP. 198605272019032010

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

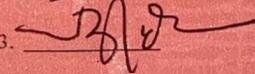
Pada hari Jumat, 23 Februari 2024 Pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB

**Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten
Pasaman Barat**

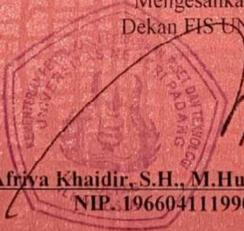
Nama : Ilham Wilya Putra
TM/NIM : 2019/19042135
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Februari 2024

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap., MPM.	1. 
Anggota	: Artha Dini Akmal, S.Ap., MPA.	2. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si.	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Wilya Putra
NIM/TM : 19042135/2019
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 29 Juni 1999
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat”** adalah benar hasil karya asli saya dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, hal tersebut tak lain merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana seabemestinya.

Padang, 16 Februari 2024



Ilham Wilya Putra
19042135

ABSTRAK

**Ilham Wilya Putra : Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan
Stunting Di Kabupaten Pasaman Barat**

Pembimbing : Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap., MPM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Dinas Kesehatan adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kesehatan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Permasalahan gizi buruk menjadi tujuan prioritas utama pemerintahan Indonesia salah satunya adalah percepatan penurunan stunting. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam penanggulangan stunting melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, pendistribusian suplemen gizi, serta program pemantauan dan evaluasi. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: Peran, Anak Stunting, Penanggulangan Stunting

ABSTRACT

Ilham Wilya Putra : Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan

Stunting Di Kabupaten Pasaman Barat

Pembimbing : Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap., MPM

This research aims to examine the role of the Health Department in efforts to combat stunting in Pasaman Barat Regency. The Health Department is one of the governmental institutions tasked with duties, functions, and responsibilities to carry out regional affairs in the field of health to achieve community well-being. Malnutrition issues have become one of the top priorities of the Indonesian government, particularly in accelerating the reduction of stunting. Stunting is a complex public health problem with long-term impacts on child growth and development. In this study, the researcher employs a qualitative approach with a descriptive method. Data are collected through interview processes and document studies. The research findings indicate that the Health Department plays a significant role in addressing stunting through various activities such as education campaigns, health examinations, distribution of nutritional supplements, as well as monitoring and evaluation programs. However, there are several challenges such as resource limitations and a lack of cross-sector coordination.

Keywords: Role, Stunted Children, Stunting Mitigation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi dengan judul “*Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat*”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Dra. Fitri Eriyanti M.Pd., Ph.D. selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, Faskultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap., MPM selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Artha Dini Akmal, S.Ap., MPA dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku Dosen Penguji.

6. Bapak dan Ibu dosen staff pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
7. Seluruh pegawai/staff Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
8. Teristimewa kepada ayah, ibu, Abang dan adek penulis yang selalu memberikan doa cinta kasih dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis yang selalu membantu dan mensupport,
10. Dan semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan yang membangun sebagai bentuk evaluasi pembelajaran selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Padang, 29 Januari 2024

Ilham Wilya Putra
NIM. 19042135

DAFTAR ISI

ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II	13
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	13
A. Kajian Teoritis	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan	20
C. Kerangka konseptual.....	25
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN	34

A. Temuan Umum	34
B. Temuan Khusus	42
BAB V	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota.....	5
Tabel 1. 2 Prevalensi Stunting Di Provinsi Sumatera Barat Pekecamatan	7
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	28
Tabel 4. 1 Data Jumlah Pegawai pada seksi kesehatan keluarga masyarakat.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	41
Gambar 4. 2 Alat Antropometri Kit dari Dinas Kesehatan.....	44
Gambar 4. 3 Kegiatan Posyandu di Sekolah dan Rumah Warga.....	45
Gambar 4. 4 Pemberian PMT atau Biskuit untuk Anak Stunting.....	46
Gambar 4. 5 Baliho Cegah Stunting di Puskesmas Sasak	49
Gambar 4. 6 Kegiatan Sosialisasi Berupa Penyuluhan Pencegahan Stunting	51
Gambar 4. 7 Koordinasi Dinas Kesehatan dengan DISKOMINFO	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi negara memiliki kewenangan, tugas dan fungsi berbeda yang telah di atur dalam peraturan perundang – undangan. Walaupun memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi setiap instansi negara memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan negara Republik Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kesehatan adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kesehatan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas yang kedudukannya di bawah tanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (Normaisa, Mahsyar, 2021).

Sebagai bagian dari pemerintah Dinas Kesehatan mempunyai tugas yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, adapun tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang di jabarkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 87 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan, tugas pokok tersebut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan kesehatan.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan kesehatan meliputi urusan bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, peningkatan gizi dan kesehatan keluarga serta pelayanan kesehatan.
- d. Pembinaan Terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari penjelasan di atas pada poin c yaitu Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan kesehatan meliputi urusan bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, peningkatan gizi dan kesehatan keluarga serta pelayanan kesehatan.

Gizi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Kekurangan gizi khususnya pada anak usia dini sangat berdampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang mengalami kekurangan gizi akan bertubuh kurus dan pendek. (Hardani M & Zuraida R, 2019).

Permasalahan gizi buruk menjadi tujuan prioritas utama pemerintahan Indonesia salah satunya adalah percepatan penurunan stunting. Balita pendek atau stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak usia dibawah 5 tahun (balita) yang disebabkan oleh faktor kekurangan gizi kronis dan seringkali disertai terjadinya penyakit infeksi. Terutama pada waktu 1.000 hari pertama

kehidupan (HPK), yang dimulai dari janin hingga anak berumur 23 bulan (Iqbal & Yusran, 2021).

Anak stunting sangat berdampak pada tidak optimalnya kemampuan kognitif anak. Menurut Yusuf kemampuan kognitif merupakan kemampuan anak dalam berfikir lebih kompleks dalam melakukan pemecahan masalah, dengan perkembangan tersebut akan mempermudah anak menguasai pengetahuan lebih luas (Daracantika et al., 2021).

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) di tahun 2017 ada sebanyak 150,8 juta anak di dunia mengalami stunting dan lebih dari setengah anak yang mengalami masalah tersebut berasal dari Asia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat angka stunting kelima di dunia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia tergolong relatif tetap pada tahun 2007 sekitar 36.8% dan mencapai 37.2% di tahun 2013. Sementara pada tahun 2018 angka prevalensi stunting mengalami penurunan sekitar 6.4% menjadi 30.8%. Meskipun sempat mengalami penurunan sebesar 6.4% pada tahun 2018. Angka tersebut masih tinggi di atas rata-rata yang telah ditetapkan oleh WHO sebesar 20% (Riski et al., 2019).

Stunting bukan merupakan masalah gizi buruk yang baru terjadi di negara Republik Indonesia. Karena angka kasusnya yang terbilang tinggi, permasalahan stunting di tetapkan sebagai isu prioritas utama di Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 memperlihatkan bahwa anak stunting di Indonesia masih terbilang tinggi di atas rata-rata yang ditetapkan oleh

WHO sebesar 20%, sedangkan angka stunting di Indonesia berada di angka 21,6% tahun 2022.

Adapun kejadian stunting di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang memiliki tingkat prevalensi stunting yang tinggi yaitu 32,05%, hal ini berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan ibu hamil seperti layanan pemeriksaan minimal sebanyak empat kali yang belum mencapai semua sasaran (69,89%) dan rendahnya konsumsi tablet tambah darah minimal 90 hari pada masa kehamilan (37,71%) dan faktor kesehatan dan non kesehatan menjadi penyebab terjadinya balita stunting secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut bisa dilihat dari arah dan kebijakan pencegahan stunting yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar pada Tahun 2017-2022. Dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa arah kebijakan pada akhir tahun 2022 yaitu menurunkan angka stunting pada balita menjadi 13,6%, di atas target nasional 14% di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Pemerintah et al., 2021).

Dari kasus stunting yang tertara diatas di wilayah Provinsi Sumatera Barat juga termasuk provinsi dengan prevalensi stunting yang tinggi. Berdasarkan data stunting di Provinsi Sumatera Barat dari Buku Saku Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 23.3%, sementara pada tahun 2022 angka prevalensi stunting di Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 25.2%. Angka tersebut masih jauh dari standar nasional yang sudah ditetapkan. Sumatera Barat menempati urutan pertama dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Adapun angka

stunting di Sumatera Barat berdasarkan kabupaten/kota sesuai dengan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Stunting (%)	
		2021	2022
1	Kota Sawahlunto	21.10	13.70
2	Kota Bukittinggi	19.00	16.80
3	Kota Padang Panjang	20.00	16.80
4	Kota Payakumbuh	20.00	17.80
5	Kota Solok	18.50	18.10
6	Kota Pariaman	20.30	18.40
7	Kota Padang Panjang	20.00	16.80
8	Kabupaten Tanah Datar	21.50	18.90
9	Kota Padang	18.90	19.50
10	Kabupaten Tanah Datar	21.50	18.90
11	Kabupaten Solok	40.10	24.20
12	Kabupaten Lima Puluh Kota	28.20	24.30
13	Kabupaten Agam	19.10	24.60
14	Kabupaten Dharmasraya	19.50	24.60
15	Kabupaten Padang Pariaman	28.30	25.00
16	Kabupaten Pasaman	30.20	28.90
17	Kabupaten Pesisir Selatan	25.20	29.80
18	Kabupaten Sijunjung	30.10	30.00
19	Kabupaten Pasaman Barat	24.00	35.50

Sumber: olahan data Survey Status Gizi (SSGI) di Provinsi Sumatera Barat

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mencatat dari tahun 2021 sampai 2022 hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat prevalensi yang masih tinggi diatas rata-rata. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu Kabupaten dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi di atas rata-rata nasional sebesar 35,5% pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat prevalensi stunting pada tahun 2021 sebesar 24,00%.

Dari kasus stunting yang sudah diketahui pada tabel 1.1. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dan di tetapkan sebagai daerah lokus penurunan stunting di Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 pada halaman 44 dijelaskan bahwa capaian indikator stunting di Kabupaten Pasaman Barat di targetkan sebesar 19%, akan tetapi terealisasikan sebesar 35,5% dari angka 100% dengan presentase realisasi kinerja sebesar 14,71% atau dengan kategori kurang.

Berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat No 188.45/120/BUP-PASBAR/2021 tentang Lokasi penetapan lokus pencegahan dan penanganan stunting tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Pasaman Barat terdapat 4 kecamatan sebagai lokasi fokus stunting dari 11 kecamatan.

Tabel 1. 2 Prevalensi Stunting Di Provinsi Sumatera Barat Pekecamatan

NO	Kecamatan	Stunting	Jumlah	% Stunting
1	Sungai Beremas	277	2271	12,2
2	Pasaman	833	4498	18,5
3	Kinali	872	6047	14,4
4	Luhak Nan Duo	466	3395	13,7
5	Gunung Tuleh	427	1942	22,0
6	Talamau	365	1907	19,1
7	Lembah Melintang	307	3796	8,1
8	Ranah Batahan	321	2280	14,1
9	Koto Balingka	697	2605	26,8
10	Sasak	300	996	30,1
11	Sungai Aur	573	2813	20,4
Jumlah		5438	32550	16,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwasanya kecamatan sasak adalah kecamatan yang paling tinggi jumlah balita stunting di Kabupaten Pasaman Barat, oleh karena itu peneliti menfokuskan penelitian ini di kecamatan Sasak Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting pada pasal 1 menyebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan kegiatan intervensi spesifik, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat bersama UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas menjalankan program intervensi spesifik dalam rangka menurunkan prevalensi stunitng di Kabupaten pasaman Barat.

Intervensi ini yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Kegiatan ini dijalankan oleh sektor kesehatan dengan sasaran intervensi ibu hamil, ibu menyusui bayi dan balita, usia sekolah, remaja dan usia produktif

adapun program gizi spesifik yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama UPTD puskesmas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil, calon pengantin, dan remaja putri selama 3 bulan berturut-turut.
2. Pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil yang kurang energi kronik (KEK) selama 90 hari
3. Kegiatan pemantauan ASI eksklusif dan anak usia 0-6 bulan
4. Program PMT untuk balita dengan status gizi kurang berupa biscuit MP ASI
5. Pemberian vitamin A untuk balita serta melakukan kegiatan posyandu massal yang dilaksanakan setiap 2 kali setahun di bulan februari dan agustus

Program gizi spesifik tersebut dilaksanakan secara rutin disetiap kegiatan posyandu serta melakukan pemantauan rutin seperti pendataan pada anak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan UPTD puskesmas agar mempermudah intervensi.

Namun demikian upaya Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat belum bisa dikatakan berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut :

Pertama, upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada (30 Mei 2024) dengan ibu Novi Yenni, S.Gz selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mengatakan bahwa:

“...yang saya ketahui belum maksimalnya Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan stunting adalah keterbatasan SDM yang kami miliki karena kegiatan yang dilakukan bukan hanya permasalahan stunting saja dan ada juga yang mendapatkan tugas *double job* terlebih masih minimnya anggaran dalam penanganan stunting tersebut”.

Kedua, masih minimnya peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam memberikan pemahaman pentingnya pencegahan stunting pada anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada (30 Mei 2024) dengan ibu Novi Yenni, S.Gz selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mengatakan bahwa:

“...salah satu faktor utamanya ya kurangnya SDM yang kami miliki dalam melaksanakan kegiatan penurunan angka stunting, terlebih lagi masih banyak balita ibu stunting yang masih tidak mau datang keposyandu karena lebih fokus pekerjaan rumah. Untuk kesadaran Masyarakat mengenai stunting sangat kurang, Masyarakat tidak menanggapi permasalahan balita stunting merupakan hal yang serius”.

Ketiga, rendahnya pendataan balita stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil

wawancara peneliti pada (30 Mei 2024) dengan ibu Novi Yenni, S.Gz selaku

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mengatakan bahwa:

“...ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai seperti kurangnya alat antropometri kit disetiap posyandu yang masih kurang hal tersebut yang dapat menghambat kegiatan pendataan balita yang dilaksanakan oleh setiap UPTD. Alasan kurang tersedianya alat tersebut belum tercukupi di setiap kegiatan posyandu yaitu kurangnya dana”.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan stunting yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu dilakukan penelitian tentang “**Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat.**” Peneliti lebih berfokus kepada peran Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Upaya Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat belum maksimal.
2. Masih minimnya peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai informasi stunting.
3. Masih rendahnya kegiatan pendataan balita yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.

C. Batasan Masalah

Pada uraian ini, peneliti dapat membatasi masalah yang akan diteliti. Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, maka batasan masalah peneliti melihat bagaimana Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah” Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Pasaman Barat dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi belum maksimalnya peran Dinas Kesehatan dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman Barat
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan Pasaman Barat dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman Barat

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang penanggulangan stunting pada anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah dan menambah pengetahuan mengenai peran dinas kesehatan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman Barat.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan evaluasi bagi dinas kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Sasak Kabupaten Pasaman Barat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat membantu memberikan pemahaman mengenai perlunya penanganan stunting pada anak melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat